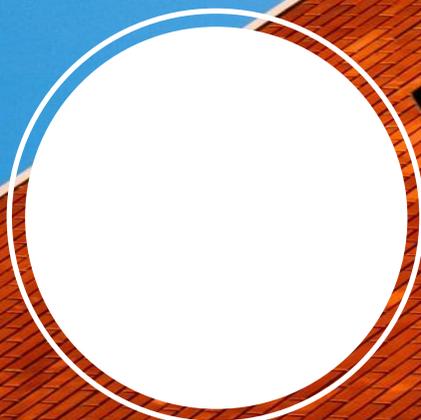
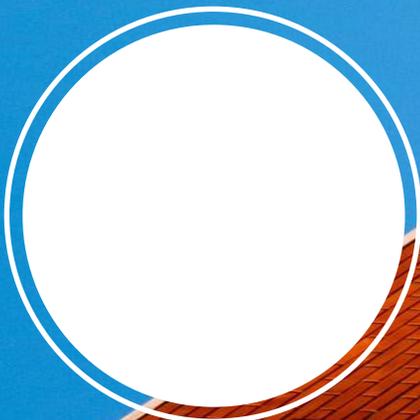




LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2023

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2023 telah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya..

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2023.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2023.

Lubuksikaping, Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH



YASRI URIPSYAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja 2023.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
a) Capaian Kinerja Organisasi.....	16
b) Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan strategis yang berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi untuk menjamin pelaksanaan kebijakan secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan kinerja disusun sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2023 adalah sebagai gambaran pencapaian sasaran selama tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2023

B. Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman;
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih, efektif, efisien dan responsif

C. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2021 - 2026.
- 6) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026.

D. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - (a) Bagian Pemerintahan membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Kewilayahan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - (b) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mental Spiritual;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Masyarakat.
 - (c) Bagian Hukum membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perundang-Undangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan Hukum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi dan Informasi.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - (a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam.
- (b) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Program;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Program; dan
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi :
1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
- (a) Bagian Umum membawahi:
1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (b) Bagian Organisasi membawahi :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- (c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi:
1. Subbagian Protokol;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Komunikasi Pimpinan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi Pimpinan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Perbup nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

c. Isu Strategis

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah.
2. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif, terukur dan terarah.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
4. Terlaksananya tata kelola pelayanan publik dengan baik.

d. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Untuk menjalankan roda organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dalam mencapai tujuannya dilengkapi dengan 180 orang personil dengan komposisi 91 orang aparatur sipil negara, 9 orang honor daerah dan 80 orang pegawai kontrak. Dari 180 orang aparatur, 36 orang dipercayakan untuk menduduki jabatan struktural dan Jabatan Fungsional sebagai berikut:

- ✓ 1 orang Sekretaris Daerah, eselon II a
- ✓ 3 orang Staf Ahli Bupati, eselon II b
- ✓ 3 orang Asisten Sekretariat Daerah eselon II b
- ✓ 9 orang Kepala Bagian, eselon III a
- ✓ 8 orang Kasubag, eselon IV a
- ✓ 13 orang Pejabat Fungsional

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan formasi persyaratan atau tuntutan pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman. Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 91 orang tersebut, yang mempunyai pendidikan Strata-2 sebanyak 13 orang, S1 sebanyak 48 orang, DIII sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 24 orang, SMP sebanyak 2 orang.

Jika dilihat dari pangkat dan golongan maka Pegawai Negeri Sipil yang 91 orang ini dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
berdasarkan golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	5
3.	Pembina Tk.I	IV/b	9
4.	Pembina	IV/a	5
5.	Penata Tk.I	III/d	17
6.	Penata	III/c	17
7.	Penata Muda Tk.I	III/b	12
8.	Penata Muda	III/a	9
9.	Pengatur Tk. I	II/d	8
10.	Pengatur	II/c	4
11.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1
12.	Pengatur Muda	II/a	2
13.	Juru	I/c	1
	J u m l a h		91

Dari tabel di atas dapat dilihat komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan yaitu sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 20 orang
- Golongan III sebanyak 55 orang
- Golongan II sebanyak 15 orang
- Golongan I sebanyak 1 orang

Tercukupinya sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman. Sarana dan prasarana ini berpengaruh terhadap kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan program kerja yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan di Bagian

Umum. Selain profesionalisme pegawai, dengan tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan di lapangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman akan semakin berjalan lancar, tertib, cepat dan mendukung kenyamanan dalam bekerja.

e. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, tujuan, dasar hukum, Gambaran Umum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
2. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023
3. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD yang digunakan sebagai acuan dan instrumen evaluasi keberhasilan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman tahun 2021 - 2026. Penyusunan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu : tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Visi RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Pasaman yang Lebih Baik dan Bermartabat”**. Visi ini diwujudkan dalam 6 (enam) misi yaitu :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan peran lembaga adat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan dasar.
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur.
5. Mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Keselarasan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman selama tahun 2016 – 2021, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	TARGET CAPAIAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Keimanan Dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Meningkatkan Peran Lembaga Adat										
	Meningkatnya pengamalan ajaran agama		Persentase anak usia sekolah melek huruf Al quran	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Propinsi	Peringkat	10	10	6	6	3	3
			2. Jumlah Muzakki	Orang	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
Misi 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih										
1.	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel		1. Capaian EKPPD	Skor	3,3840	3,3846	3,3856	3,3866	3,3876	3,3886
			2. Predikat SAKIP	Predikat	B (61,38)	B (64,85)	B (66,70)	B (68,65)	BB (70,85)	ST (73,15)
			3. Penggunaan E Procurement terhadap belanja pengadaan	%	100	100	100	100	100	100
		1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Setda	1. Nilai EKPPD Setda	Predikat	ST (3,260)	ST (3,275)	ST (3,280)	ST (3,285)	ST (3,290)	ST (3,295)
			2. Nilai SAKIP Setda	Predikat	BB (76,05)	BB (78,10)	BB (80,00)	A (82,15)	A (84,05)	A (86,00)
		2. Terwujudnya Pembangunan yang bersinergitas dan tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target kinerja	%	100	100	100	100	100	100
2.	Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas		Indeks persepsi kualitas pelayanan	indeks	77,54	79,54	81,54	83,54	85,54	87,54
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berpredikat baik	%	100	100	100	100	100	100

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman memperjanjikan target kinerja yang tertera pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
2	3	4
1.1 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ tingkat Propinsi	6
	2. Jumlah Muzaki yang menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5.100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
2	3	4
2.1 Mewujudkan akuntabilitas kinerja Setda	Nilai EMPPD Setda	ST (3,280)
	Nilai SAKIP Setda	BB (80,00)
2.2 Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target kinerja	100
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berpredikat baik	100

Tabel 2.2.
Program dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Tahun 2023

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.108.751.974	24.571.626.973
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.098.200	190.343.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.098.300	185.343.300
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.154.369.388	10.840.106.485
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.938.969.388	10.619.306.485
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.400.000	220.800.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	235.350.000	126.750.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	235.350.000	126.750.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.354.139.683	4.327.306.662
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	108.545.000	106.545.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.249.000	425.303.930
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.090.883	30.090.883
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	578.690.000	1.088.494.560
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.521.564.800	2.676.872.289
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.411.910.000	2.828.800.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.354.310.000	2.771.200.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000	51.000.000

		Pengadaan Mebel	6.600.000	6.600.000
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.521.054.550	2.835.794.472
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	486.354.550	678.344.472
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.034.700.000	2.157.450.000
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.010.350.000	1.350.266.001
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	326.500.000	341.500.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	778.500.000	378.500.000
		Pemeliharaan Mebel	900.000	900.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	99.910.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	804.450.000	509.456.001
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	20.000.000
8		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.014.044.753	864.044.753
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	175.394.753	175.394.753
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	188.650.000	188.650.000
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000	100.000.000
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000
9		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	600.000.000	681.780.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000	325.000.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	240.000.000	290.000.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	60.000.000	66.780.000
10		Penataan Organisasi	341.470.000	266.470.000
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.000.000	73.005.000
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60.250.000	38.600.000
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.150.000	38.795.000
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan	60.510.000	45.510.000

		Publik dan Tata Laksana		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	70.560.000	70.560.000
	11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	284.965.400	259.965.400
		Fasilitasi Keprotokolan	181.156.500	211.566.500
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	53.645.000	16.835.000
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	50.163.900	31.563.900
2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.015.191.200	14.467.806.200
	12	Administrasi Tata Pemerintahan	784.649.200	438.324.200
		Penataan Administrasi Pemerintahan	619.655.100	287.415.100
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	99.995.100	95.915.100
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	64.999.000	54.994.000
	13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.362.717.000	13.287.717.000
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.600.120.500	6.575.120.500
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6.440.400.000	6.390.400.000
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	322.196.500	322.196.500
	14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	822.830.000	697.830.000
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	372.555.000	362.555.000
		Fasilitasi Bantuan Hukum	352.770.000	243.770.000
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	97.505.000	91.505.000
	15	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	44.995.000	43.935.000
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	44.995.000	43.935.000
3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.143.965.450	929.417.900
	16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	290.972.450	240.461.800
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	156.548.700	60.062.200
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.423.500	145.632.500
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	44.999.850	34.767.100
	17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	471.180.300	355.680.300
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	87.495.000	72.115.000
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	194.380.000	125.960.000
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	189.305.300	157.605.300
	18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	291.820.000	261.292.700

		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	118.660.000	115.717.000
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100.630.000	86.637.200
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	72.530.000	58.938.500
	19	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	89.993.100	71.983.100
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	29.998.200	17.228.200
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	29.999.100	26.409.100
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	29.995.800	28.345.800
Total			39.267.908.624	39.968.851.073

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	TARGET CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Keimanan Dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Meningkatkan Peran Lembaga Adat				
1.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Propinsi	6
			2. Jumlah Muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi	5.100
Misi 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih				
2.	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Setda	1. Nilai EMPPD Setda	ST (3,280)
			2. Nilai SAKIP Setda	BB (80,00)
		4. Terwujudnya Pembangunan yang bersinergitas dan tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100
3.	Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berpredikat baik	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Berdasarkan Renstra 2021-2026 telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) Sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pasaman.

Evaluasi Indikator kinerja utama dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai dengan kriteria penilaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan interval penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Interval

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah dapat melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 188.08/ 05 /2022.

Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	Rangking	6	10	33,3%
	2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	orang	5.100 Orang	4.139 Orang	81,16 %
Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai EMPPD Setda	Predikat	ST (3,280)	T (2,779)	84,72
	2. Nilai SAKIP Setda	Predikat	BB (80,00)	BB (78,11)	97,63
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target kinerja	%	100%	95,56%	95,56%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berpredikat baik	%	100%	100%	100%
Total					82,07%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2023 adalah sebesar 82,07 %.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

1. Membandingkan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini, berikut analisis pendukung

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan				
	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	2	4	5	6
1	Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	6	10	33,3%
2	Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5.100 Orang	4.139 Orang	81,16 %
Sasaran Strategis 2 : Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah				
1	Nilai EMPPD Setda	ST (3,280)	T (2,779)	84,72 %
2	Nilai SAKIP Setda	BB (80,00)	BB (78,11)	97,63%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran				
1	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100%	95,56%	95,56%
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
1	Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	100%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, berikut analisis pendukung

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun)	Pencapaian Kinerja Tahun 2021	Pencapaian Kinerja Tahun 2022	Pencapaian Kinerja Tahun 2023
1. Peringkat MTQ	6	4	4	10

Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun)	Pencapaian Kinerja Tahun 2021	Pencapaian Kinerja Tahun 2022	Pencapaian Kinerja Tahun 2023
Tingkat Provinsi				
2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5.100 Orang	8.024 orang	4.145 Orang	4.139 Orang
1. Nilai EMPPD Setda	ST (3,280)	ST	ST (3,160)	T (2,779)
2. Nilai SAKIP Setda	BB (80,00)	BB (74,05)	BB (74,42)	BB (78,11)
Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100%	88,19	85	95,56
Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	100%	84,62	84,62	100%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, berikut analisis pendukung

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 sampai dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target kinerja Sesuai Renstra (selama 5 Tahun)	Akumulasi kinerja s.d tahun 2023	% capaian tahun 2023
1	2	7	8	
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	6	10	33,3%
	2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5.100 orang	4.139 Orang	81,16 %
Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai EMPPD Setda	ST	T (2,779)	84,72
	2. Nilai SAKIP Setda	BB	BB (78,11)	97,62
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100	95,56	95,56

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target kinerja Sesuai Renstra (selama 5 Tahun)	Akumulasi kinerja s.d tahun 2023	% capaian tahun 2023
1	2	7	8	
sasaran				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berprediket BAIK	100%	100%	100%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

a. sasaran 1

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan

Sasaran ini diukur dengan dengan 2 (dua) indikator kinerja yang meliputi : Peringkat MTQ tingkat Propinsi dan Jumlah muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah.

Sebagai kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama islam serta memiliki historis sebagai sentral penyebaran agama islam pada masa lampau dengan landasan filosofi ABS-SBK, sampai saat ini belum mampu secara optimal diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Pasaman. Selain itu, pemahaman nilai-nilai ajaran agama juga belum sepenuhnya terlaksana, begitu juga dengan pelestarian dan pengembangan adat dan budaya belum optimal menyentuh peranan generasi muda Pasaman.

Pada bulan Desember tahun kafilah kabupaten Pasaman mengikuti MTQ Nasional Tk. Provinsi Sumatera Barat di Solok Selatan Tahun 2023. Kabupaten Pasaman meraih peringkat ke 10.

Untuk menunjang peningkatan pendidikan keagamaan diberikan insentif honor terhadap guru TPQ/TPSQ dan MDTA se Kabupaten Pasaman dengan anggaran 1,9 Milyar dan telah diberikan kepada 1824 orang guru masing-masing diberikan sekali tiga bulan sesuai kategori jumlah murid yang diajar, bagi muridnya dibawah 25 diberikan Rp. 250.000 per triwulan, diatas 25 sampai 50 diberikan Rp. 300.000 per triwulan dan diatas 50 diberikan Tp. 350.000 per triwulan.

permasalahan dalam sasaran ini :

1. Belum maksimalnya pembinaan kehidupan beragama masyarakat

2. Belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas keagamaan sebagai pusat kegiatan masyarakat
3. Belum optimalnya fasilitasi lembaga keagamaan
4. Masih rendahnya kualitas SDM keagamaan

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan

1. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dimasing-masing nagari
2. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas keagamaan.
3. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM keagamaan

Sedangkan untuk jumlah muzaki yang menyalurkan zakat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Bulan	Jumlah muzaki
1	Januari	4.123
2	Februari	4.123
3	Maret	4.127
4	April	4.137
5	Mai	4.133
6	Juni	4.133
7	Juli	4.134
8	Agustus	4.135
9	September	4.135
10	Oktober	4.135
11	November	4.139
12	Desember	4.139
	Total	49.595

b. sasaran 2

Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Sasaran ini didukung dengan 2 (dua) indikator yaitu nilai SAKIP Setda dan Nilai EMPPD Setda.

Pada tahun 2023 capaian nilai SAKIP 78,11 predikat BB. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Setda. Nilai SAKIP Setda Tahun 2023 adalah hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan rincian penilaian sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja : bobot 30 dengan nilai 25,80
- Pengukuran Kinerja : bobot 30 dengan nilai 21,30
- Pelaporan Kinerja : bobot 15 dengan nilai 10,50
- Evaluasi akuntabilitas Internal : bobot 25 dengan nilai 20,50

Untuk mendukung pencapaian indikator nilai SAKIP Setda telah dilaksanakan beberapa kegiatan :

- ✓ Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Sekretariat Daerah telah menerapkan SIPD dalam system perencanaan dan penganggaran
- ✓ Pelaksanaan rapat di lingkungan Setda dalam rangka penyusunan pohon kinerja
- ✓ Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk indikator kinerja nilai EMPDD Setda pada tahun 2023 diperoleh nilai 2,779 dengan prestasi kerja B Kategori Tinggi. Nilai ini turun dari tahun sebelumnya disebabkan karena belum dikeluarkannya nilai pimpinan oleh Bupati.

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, guna mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja Perangkat Daerah.

Permasalahan dalam pencapaian sasaran :

- 1) Komitmen pimpinan dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indikator masih perlu diperkuat.
- 2) Aplikasi yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum menjawab kebutuhan daerah
- 3) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan.
- 4) Kurang adanya sinergi dalam proses perencanaan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan :

- 1) Perlunya komitmen pimpinan serta jajarannya untuk penyelarasan indikator sehingga capaian sasaran dan capaian target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik.

- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat sehingga dapat sepenuhnya terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah
- 3) Memberikan pendampingan dalam penyusunan terhadap laporan kinerja dengan melakukan pedalaman analisa capaian kinerja, bukan hanya pelaksanaan kegiatan dan capaian anggaran saja dan juga pendampingan dalam upaya pencapaian indikator kinerja kunci
- 4) Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU;
- 5) Melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah.

c. sasaran 3

Terwujudnya Pembangunan Bersinergitas Yang Tepat Sasaran

sasaran strategis ini didukung dengan indikator kinerja persentase kegiatan yang mencapai target, capaian indikator untuk tahun 2023 adalah sebesar 85 %.

Sinergitas adalah membangun dan memastikan hubungan internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Sinergitas merupakan kunci keberhasilan dalam melakukan upaya pembangunan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman terus mendorong sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah. Sinergitas diperlukan untuk saling menguatkan dengan melakukan pembangunan dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu entitas dengan entitas lainnya guna meningkatkan daya saing, efektifitas kecepatan layanan ataupun eksekusi, serta kenyamanan pengguna.

Secara umum indikator ini belum dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Permasalahan dalam pencapaian sasaran :

- 1) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan
- 2) Masih kurangnya SDM sehingga tidak memenuhi tuntutan tugas dan beban kerja
- 3) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan :

- 1) Perlunya komitmen pimpinan serta jajarannya sehingga capaian kegiatan dapat tercapai dengan baik.
 - 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM
 - 3) Meningkatkan koordinasi antar bagian
- d. sasaran 4

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

indikator kinerja yang mendukung sasaran ini adalah Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik secara berkala serta sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan publik dan sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.

Telah dilakukan pembinaan dan bimbingan serta pendampingan kepada 7 UPP yang dinilai oleh Ombudsman RI sebagai bentuk Tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik, dan Kabupaten Pasaman untuk Tahun 2023 telah berhasil kembali masuk “ Zona Hijau “ dengan perolehan nilai 90,42 kategori A dengan opini kualitas tertinggi

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana didukung anggaran sebesar Rp. 38.600.000,00 dengan realisasi anggaran sampai Desember sebesar Rp. 35.298.900,00. dengan capaian 91,45%

Hasil yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

- a. Telah dilakukan pembinaan dan bimbingan serta pendampingan kepada 7 UPP yang dinilai oleh Ombudsman RI sebagai bentuk Tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik, dan Kabupaten Pasaman untuk Tahun 2023 telah berhasil kembali masuk “ Zona Hijau “ dengan perolehan nilai 90,42 kategori A dengan opini kualitas tertinggi.



- b. Terlaksananya forum konsultasi publik (FKP) untuk 6 unit pelayanan publik (UPP) pada tanggal 16 November 2023 di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Pasaman



- c. Telah Tersedianya laporan hasil survey Mandiri Indeks Kepuasan Masyarakat pada 32 UPP yang telah disampaikan ke Kemenpan RB dengan rata-rata nilai pelayanan publik 86,06.
Tabel penyampaian hasil SKM tahun 2023.

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan*	Nilai Per Unsur**									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
1	RSUD Lubuk Sikaping	Semester 1 (Januari – Juni)	88,2	84,0	82,2	90,5	84,2	83,7	85,0	80,8	85,0	83,99	BAIK	150	Manual			
2	Dinas Kesehatan	Semester 1 (Januari – Juni)	93,3	93,0	94,5	97,8	86,3	86,3	90,5	87,8	97,8	90,97	SANGAT BAIK	100	Manual			
3	Dinas Pendidikan	Semester 1 (Januari – Juni)	78,0	78,8	77,8	93,0	79,5	81,8	82,5	79,5	95,3	82,06	BAIK	100	Manual			
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semester 1 (Januari – Juni)	84,5	82,0	83,5	96,8	84,0	86,3	85,3	85,3	96,0	86,19	BAIK	100	Manual			
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Semester 1 (Januari – Juni)	82,9	81,5	87,3	94,9	82,9	85,3	89,8	81,1	97,7	82,9	BAIK	100	Manual			
6	Dinas Sosial	Semester 1 (Januari – Juni)	86,5	88,0	86,0	99,0	85,0	85,5	88,0	83,0	99,5	88,06	BAIK	50	Manual			
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Semester 1 (Januari – Juni)	82,0	82,0	81,5	100	82,0	87,0	88,0	77,5	95,5	85,31	BAIK	50	Manual			
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang	Semester 1 (Januari – Juni)	78,0	97,5	76,5	100	82,5	85,5	77,0	92,0	99,5	86,74	BAIK	50	Manual	1. Kecepatan Waktu Pelayanan	Kecepatan Waktu Pelayanan • Peningkatan sosialisasi • Menambah loket pelayanan	

9	BPBD	Semester 1 (Januari – Juni)	74,6	76,7	72,9	100	77,5	80,4	79,2	73,3	91,3	79,84	BAIK	60	Manual	<p>1.Persyaratan Pelayanan</p> <p>2.Kecepatan waktu pelayanan</p> <p>3.Kualitas sarana dan prasarana</p>	<p>Persyaratan Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah syarat pelayanan <p>Kecepatan Waktu pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambah loket pelayanan <p>Kualitas sarana dan prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambah pengadaan sarana dan prasana 	
10	Dinas Pertanian	Semester 1 (Januari – Juni)	82,5	80,0	79,5	90,5	80,5	84,0	82,5	79,5	86,0	81,95	BAIK	50	Manual			
11	Dinas Koperasi, UMKM , Perdagangan dan Tenaga Kerja	Semester 1 (Januari – Juni)	85,8	86,4	85,6	99,5	84,3	88,7	88,1	86,4	98,5	88,38	SANGAT BAIK	150	Manual			
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Semester 1 (Januari – Juni)	83,0	83,0	84,5	94,5	85,0	88,5	90,0	84,5	96,5	86,85	BAIK	50	Manual			
13	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Perhubungan Dan Lingkungan Hidup	Semester 1 (Januari – Juni)	78,5	77,5	74,5	78,5	79,5	80,0	80,0	76,0	88,5	78,43	BAIK	50	Manual	<p>1.Kecepatan Waktu Layanan</p> <p>2.Kualitas Sarana dan Prasarana</p>	<p>Kecepatan Waktu pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambah loket pelayanan <p>Kualitas sarana dan prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambah pengadaan sarana dan prasana 	
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Semester 1 (Januari – Juni)	83,0	83,0	84,5	94,5	85,0	88,5	90,0	84,5	96,5	86,85	BAIK	50	Manual			

15	Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan kebudayaan	Semester 1 (Januari – Juni)	81,0	83,5	77,0	84,0	81,0	86,0	80,0	87,5	83,5	81,79	BAIK	50	Manual	1.Kecepatan Waktu Layanan 2.Kesopanan dan keramahan petugas		
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		83,0	81,5	82,5	93,5	81,5	86,0	85,5	81,5	95,5	84,76						
17	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semester 1 (Januari – Juni)	81,0	85,0	84,5	98,0	80,5	85,0	84,5	80,5	99,0	85,58	BAIK	50	Manual			
18	Bagian Kesra	Semester 1 (Januari – Juni)	89,0	88,5	89,5	97,0	90,0	89,0	92,0	91,0	100	90,86	SANGAT BAIK	50	Manual			
19	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Semester 1 (Januari – Juni)	81,0	86,0	84,0	100	84,0	88,0	82,0	82,5	97,5	86,35	BAIK	50	Manual			
20	Kecamatan Bonjol	Semester 1 (Januari – Juni)	83,5	83,5	78,0	100	86,0	85,0	81,0	82,5	97,0	85,42	BAIK	50	Manual			
21	Kecamatan Simpang Alahan Mati	Semester 1 (Januari – Juni)	86,0	94,0	89,0	99,0	91,5	93,0	92,5	96,5	99,5	92,51	SANGAT BAIK	50	Manual			
22	Kecamatan Lubuk Sikaping	Semester 1 (Januari – Juni)	80,5	81,5	84,0	100	85,5	86,5	87,0	86,5	86,5	85,58	BAIK	50	Manual			
23	Kecamatan Panti	Semester 1 (Januari – Juni)	77,5	79,0	78,5	100	79,0	83,5	76,0	79,5	100	82,83	BAIK	50	Manual	Kesopanan dan keramahan petugas		

24	Kecamatan Tigo Nagari	Semester 1 (Januari – Juni)	74,0	74,5	73,5	100	75,5	75,0	76,0	73,5	96,5	79,04	BAIK	50	Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan 2. Prosedur pelayanan 3. Kesesuaian produk pelayanan 4. Kemampuan/kompetensi pelayanan 5. Kesopanan dan keramahan petugas 6. Kualitas sarana dan prasarana 7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan pengguna layanan 	<p>Persyaratan pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • mempermudah syarat layanan <p>Prosedur pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah layanan <p>Kemampuan/kompetensi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas layanan <p>Kualitas sarana dan prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan sarana dan prasarana layanan <p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan pengguna layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat sop pelayanan publik 	
25	Kecamatan Duo Koto	Semester 1 (Januari – Juni)	80,5	82,0	85,5	93,5	84,0	84,5	83,5	81,0	80,5	84,04	BAIK	50	Manual			
26	Kecamatan Rao Utara	Semester 1 (Januari – Juni)	79,5	79,0	80,0	95,5	85,5	86,5	88,5	85,5	97,0	85,47	BAIK	50	Manual			
27	Kecamatan Rao	Semester 1 (Januari – Juni)	79,0	83,5	80,5	100	84,5	81,0	86,5	86,5	93,0	85,20	BAIK	50	Manual			
28	Kecamatan Mapattunggul	Semester 1 (Januari – Juni)																

29	Kecamatan Mapattunggul Selatan	Semester 1 (Januari – Juni)	95,0	90,0	95,0	100	75,0	75,0	75,0	75,0	98,0	85,58	BAIK	50	Manual	<p>1. Kesesuaian produk layanan</p> <p>2. Kemampuan/kompetensi petugas pelayanan</p> <p>3. Kesopanan dan keramahan petugas</p> <p>4. Kualitas sarana prasarana</p>	<p>Kesesuaian produk layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan fasilitas layanan publik <p>Kamampuan/kompetensi petugas pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelatihan dan bimbingan terhadap petugas layanan <p>Kesopanan dan keramahan petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelatihan dan bimbingan terhadap petugas layanan <p>Kualitas sarana prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan serta melengkapi sarana prasarana layanan
30	Puskesmas Lubuk Sikaping	Semester 1 (Januari – Juni)	83,0	80,0	79,5	94,0	84,5	86,8	83,0	81,3	92,0	84,04	BAIK	100	Manual		
31	Puskesmas Sundatar	Semester 1 (Januari – Juni)	94,8	91,8	95,2	96,8	94,5	95,5	76,5	97,2	98,3	92,47	SANGAT BAIK	150	Manual		
32	Puskesmas Kumpulan	Semester 1 (Januari – Juni)	80,5	83,5	80,0	96,0	79,5	83,0	83,5	81,5	89,3	83,24	BAIK	100	Manual		

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik adalah:

- ◆ Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
- ◆ Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi;
- ◆ Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

1. Standar pelayanan

Pengukuran ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- ◆ Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
- ◆ Unit kerja telah memaklumkan standar pelayanan;
- ◆ Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
- ◆ Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

2. Budaya pelayanan prima

Pengukuran ini dilakukan pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti;

- ◆ Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- ◆ Unit kerja telah memiliki sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- ◆ Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
- ◆ Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.

3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Pengukuran ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti;

- ◆ Unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- ◆ Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- ◆ Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Permasalahan dalam pencapaian sasaran :

- 1) Komitmen pimpinan dan jajarannya terhadap peningkatan standar pelayanan publik masih perlu diperkuat.
- 2) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pelayanan publik dengan baik.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik secara kontiniu dan berkelanjutan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisien penggunaan sumber daya manusia, kondisi per 31 Desember 2023 di Lingkungan Setda jumlah kebutuhan sesuai dengan ANJAB dan ABK adalah 268 ASN sedangkan yang tersedia saat ini hanya 91 ASN sehingga masih kurang 117 ASN. Kekurangan ini lebih dominan untuk jabatan pelaksana. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa PNS yang pensiun dan promosi jabatan.

Sementara untuk analisis sumber daya keuangan yang mendukung capaian kinerja, memiliki realisasi sebesar 95,56% dengan tingkat efisiensi sebesar 4,44% dan efektifitas capaian indikator kinerja adalah 82,07%.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tabel 3.6
Program/Kegiatan Penunjang Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan
1	2	3	4
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	99,03%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	99,03%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	77,59%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Mewujudkan Pelayanan Publik Sesuai Standar	88,43%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan organisasi

B. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.108.751.974	24.571.626.973	23.144.407.539	1.427.219.434	94,19
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.098.200	190.343.200	124.345.436	65.997.764	65,33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900	0	4.999.900	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.098.300	185.343.300	124.345.436	60.997.864	67,09
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.154.369.388	10.840.106.485	10.638.634.532	201.471.953	98,14
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.938.969.388	10.619.306.485	10.420.342.032	198.964.453	98,13
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.400.000	220.800.000	218.292.500	2.507.500	98,86
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	235.350.000	126.750.000	115.250.000	11.500.000	90,93
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	235.350.000	126.750.000	115.250.000	11.500.000	90,93
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.354.139.683	4.327.306.662	4.180.822.726	146.483.936	96,61

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Capaian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	108.545.000	106.545.000	106.201.750	343.250	99,68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.249.000	425.303.930	317.633.309	107.670.621	74,68
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.090.883	30.090.883	27.168.750	2.922.133	90,29
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	578.690.000	1.088.494.560	1.079.891.000	8.603.560	99,21
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.521.564.800	2.676.872.289	2.649.927.917	26.944.372	98,99
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.411.910.000	2.828.800.000	2.811.440.000	17.360.000	99,39
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.354.310.000	2.771.200.000	2.771.200.000	0	100,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000	51.000.000	40.240.000	10.760.000	78,90
	Pengadaan Mebel	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.521.054.550	2.835.794.472	2.595.339.250	240.455.222	91,52
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	486.354.550	678.344.472	603.039.426	75.305.046	88,90
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.034.700.000	2.157.450.000	1.992.299.824	165.150.176	92,35
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.010.350.000	1.350.266.001	889.992.838	460.273.163	65,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	326.500.000	341.500.000	311.507.505	29.992.495	91,22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	778.500.000	378.500.000	159.698.333	218.801.667	42,19
	Pemeliharaan Mebel	900.000	900.000	155.000	745.000	17,22
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	99.910.000	98.394.000	1.516.000	98,48
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	804.450.000	509.456.001	320.238.000	189.218.001	62,86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0,00
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.014.044.753	864.044.753	756.369.596	107.675.157	87,54
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	175.394.753	175.394.753	159.758.431	15.636.322	91,09
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	188.650.000	188.650.000	181.900.000	6.750.000	96,42
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000	100.000.000	31.711.165	68.288.835	31,71
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	383.000.000	17.000.000	95,75
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	600.000.000	681.780.000	553.737.000	128.043.000	81,22
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000	325.000.000	282.987.000	42.013.000	87,07

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Capaian
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	240.000.000	290.000.000	220.000.000	70.000.000	75,86
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	60.000.000	66.780.000	50.750.000	16.030.000	76,00
10	Penataan Organisasi	341.470.000	266.470.000	235.652.270	30.817.730	88,43
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.000.000	73.005.000	66.005.450	6.999.550	90,41
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60.250.000	38.600.000	35.298.900	3.301.100	91,45
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.150.000	38.795.000	31.592.822	7.202.178	81,44
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60.510.000	45.510.000	37.886.548	7.623.452	83,25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	70.560.000	70.560.000	64.868.550	5.691.450	91,93
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	284.965.400	259.965.400	242.823.891	17.141.509	93,41
	Fasilitasi Keprotokolkan	181.156.500	211.566.500	195.902.791	15.663.709	92,60
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	53.645.000	16.835.000	15.910.500	924.500	94,51
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	50.163.900	31.563.900	31.010.600	553.300	98,25
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.015.191.200	14.467.806.200	14.327.125.423	140.680.777	99,03
12	Administrasi Tata Pemerintahan	784.649.200	438.324.200	297.643.423	140.680.777	67,90
	Penataan Administrasi Pemerintahan	619.655.100	287.415.100	215.250.963	72.164.137	74,89
	Pengelolaan Administrasi Wilayah	99.995.100	95.915.100	50.207.760	45.707.340	52,35
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	64.999.000	54.994.000	32.184.700	22.809.300	58,52
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.362.717.000	13.287.717.000	12.619.118.216	668.598.784	94,97
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.600.120.500	6.575.120.500	6.246.509.766	328.610.734	95,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6.440.400.000	6.390.400.000	6.073.498.950	316.901.050	95,04
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	322.196.500	322.196.500	299.109.500	23.087.000	92,83
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	822.830.000	697.830.000	507.546.637	190.283.363	72,73
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	372.555.000	362.555.000	264.631.292	97.923.708	72,99
	Fasilitasi Bantuan Hukum	352.770.000	243.770.000	165.801.736	77.968.264	68,02
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	97.505.000	91.505.000	77.113.609	14.391.391	84,27
15	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	44.995.000	43.935.000	37.175.200	6.759.800	84,61
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	44.995.000	43.935.000	37.175.200	6.759.800	84,61
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.143.965.450	929.417.900	721.176.964	208.240.936	77,59
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	290.972.050	240.461.800	217.360.967	23.100.833	90,39
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	156.548.700	60.062.200	51.827.057	8.235.143	86,29
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.423.500	145.632.500	134.589.010	11.043.490	92,42

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Capaian
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	44.999.850	34.767.100	30.944.900	3.822.200	89,01
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	471.180.300	355.680.300	208.034.548	147.645.752	58,49
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	87.495.000	72.115.000	48.397.680	23.717.320	67,11
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	194.380.000	125.960.000	91.680.018	34.279.982	72,79
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	189.305.300	157.605.300	67.956.850	89.648.450	43,12
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	291.820.000	261.292.700	238.684.832	22.607.868	91,35
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	118.660.000	115.717.000	108.919.824	6.797.176	94,13
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100.630.000	86.637.200	77.054.558	9.582.642	88,94
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	72.530.000	58.938.500	52.710.450	6.228.050	89,43
19	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	89.993.100	71.983.100	57.096.617	14.886.483	79,32
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	29.998.200	17.228.200	15.078.900	2.149.300	87,52
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	29.999.100	26.409.100	16.899.900	9.509.200	63,99
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	29.995.800	28.345.800	25.117.817	3.227.983	88,61
Total		39.267.908.624	39.968.851.073	38.192.709.926	1.776.141.147	95,56

Pada tahun 2023 anggaran yang tersedia pada Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp **39.968.851.073** dan terealisasi sebesar Rp **38.192.709.926**, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 95,56 %.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran, untuk mencapai 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 (tiga) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan capaian indikator kinerja 82,07 % dan capaian realiasi anggaran 95,56%

Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, meskipun tidak ada yang melebihi target. Disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan.